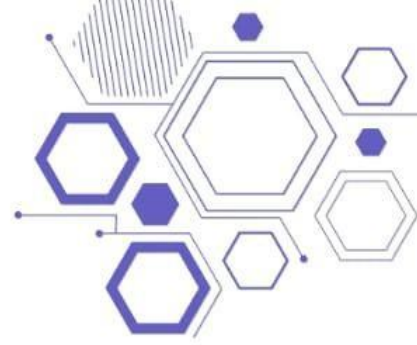
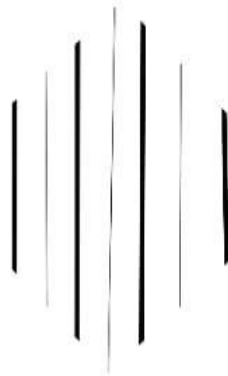




RENCANA KERJA



KECAMATAN UJUNGPAANGKAH

KABUPATEN GRESIK

Tahun 2026

Jalan Sitarda No. 01,
Ujungpangkah, Gresik, Jawa
Timur.



RENCANA KERJA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2026 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan rencana APBD Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2026 memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2026 berdasarkan hasil Forum satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini mengakomodasi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusun Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian sebagai upaya korektif bagi penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.



RENCANA KERJA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH

Ujungpangkah, 20 Oktober 2025

CAMAT UJUNGPAANGKAH

SHOFWAN HADI, S.Ag., M.MB

Pembina

NIP. 19750926 200901 1 001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, maka diperlukan dokumen perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Salah satu dokumen yang menjadi instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 disusun sebagai acuan bagi seluruh aparatur pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2026.

Kecamatan Ujungpangkah sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, mengingat posisinya yang berada di kawasan pesisir utara dengan potensi ekonomi berbasis kelautan, perikanan, dan pertanian. Wilayah ini juga memiliki tantangan tersendiri terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan antar desa, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Penyusunan Renja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 juga merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana kerja tahunan sebagai bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara terpadu. Dengan demikian, Renja Kecamatan memiliki kedudukan strategis sebagai dokumen perencanaan yang menjembatani antara Rencana Strategis Kecamatan (Renstra) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik.

RENCANA KERJA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH

Tahun 2026 juga merupakan tahun terakhir dari periode Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, penyusunan Renja ini memiliki arti penting dalam mengevaluasi capaian target pembangunan selama lima tahun terakhir serta menentukan prioritas akhir yang perlu dicapai sebelum memasuki periode perencanaan berikutnya. Melalui Renja ini diharapkan dapat tercipta kesinambungan kebijakan dan sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam rangka mendukung visi pembangunan Kabupaten Gresik yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.

Selain itu, penyusunan Renja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 juga mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta memperhatikan dinamika sosial ekonomi di tingkat lokal. Proses penyusunan Renja dilakukan secara partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan unsur swasta. Dengan pendekatan partisipatif ini, diharapkan dokumen Renja tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Pada akhirnya, Renja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat, efektif, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Ujungpangkah dapat berjalan secara efisien dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



RENCANA KERJA KECAMATAN UJUNGPAKHAH

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
8. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman operasional dan arah kebijakan tahunan bagi perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Ujungpangkah. Dokumen ini memiliki arti penting karena menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan.

Secara substansial, penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah. Renja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 juga merupakan bentuk implementasi dari prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan adanya Renja, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan dapat direncanakan secara lebih terukur, memiliki target kinerja yang jelas, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Dari sisi perencanaan, dokumen Renja berfungsi sebagai media penyelarasan antara kebijakan strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2021-2026 dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026

. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan yang diusulkan oleh kecamatan selaras dengan arah pembangunan kabupaten, serta mendukung



RENCANA KERJA KECAMATAN UJUNGPAKKAH

pencapaian indikator kinerja utama daerah. Selain itu, Renja juga menjadi acuan bagi perangkat kecamatan dalam menyusun usulan kegiatan kepada perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten agar dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang lebih tinggi.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 antara lain adalah:

1. Sebagai pedoman kerja tahunan bagi Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan pembangunan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan daerah.
2. Sebagai dasar dalam penganggaran dan pengambilan keputusan, sehingga alokasi sumber daya, baik keuangan maupun non-keuangan, dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
3. Sebagai sarana koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja, yang memungkinkan pemerintah kecamatan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta melakukan perbaikan berkelanjutan.
5. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik, agar masyarakat mengetahui arah, prioritas, dan hasil dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Ujungpangkah.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, penyusunan Renja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 diharapkan mampu menciptakan keselarasan dan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Ujungpangkah. Renja ini juga diharapkan menjadi instrumen yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga dapat menjadi dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025, diformulasikan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini berisi :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah Program dan Kegiatan



RENCANA KERJA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.2. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN : Matrik Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 Lampiran memuat tabel Matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, berbagai program dan kegiatan telah diupayakan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat peran pemerintah kecamatan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.

Tercapai dan tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi pada masa mendatang, sebagai berikut :

1. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki; dan
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Renja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan Tahun 2026; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk



RENCANA KERJA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 Kecamatan Ujungpangkah diukur dari sasaran strategis mendapat predikat Baik, yang di Ujungpangkah oleh pelaksanaan 5 (Lima) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp3.512.191.803,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.351,473.275,32 (95.42%). sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.160.718.527.(Seratus enam juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ujungpangkah sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada ***Tabel 2.1 (Tabel T-C.29), Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) sebagai berikut :***

Tabel 2.1. (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun (2017))
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ujungpangkah
s.d. Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN UJUNGPAKANGKAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program perubahan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Ujungpangkah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tahun Berjalan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tahunberjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketercapaian sasaran Program OPD	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	36 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	62,86
7	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	57,14
7	1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	6 dokumen	1dokumen	1dokumen	1dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	57,14
7	1	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1dokumen	1 dokumen	57,14
7	1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1dokumen	1 dokumen	57,14
7	1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	38,55
7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	72 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 bulan	12 bulan	57,14
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang	22 orang	22 orang	22 orang	100%	25 orang	25 orang	66,67
7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	57,14
7	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	-
7	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	57,14
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1paket	1paket	57,14
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	57,14
7	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Undang" yang disediakan								
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	57,14
7	1	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1dokumen	1dokumen	66,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program perubahan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Ujungpangkah s/d tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasiitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeretintahan Daerah	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100,00
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 bulan	12 bulan	57,14
7	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Karitor yang Disediakan								
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 bulan	12 bulan	64,29
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur			12 bulan	12 bulan	100%			46,43
7	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	12 umit	12 unit	57,14
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	40,00
7	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	40,00
7	1	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset yang Dipelihara/Direhabilitasi								
7	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71,43
7	1	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Perangkat Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	7 kegiatan	7 kegiatan	24,24
7	1	02	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelyanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	7 keg/5 dok	7 keg/5 dok	7 keg/5 dok	7 keg/5 dok	100%	5 dokumen	5 dokumen	30,30
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
7	1	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	100%	100%	100,00
7	1	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 desa	28,57
7	1	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan								
7	1	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditingkat Kecamatan	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 desa	100,00
7	1	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 desa	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program perubahan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tahun Berjalan	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Ujungpangkah s/d tahun 2025	
															Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tahunberjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9			10	(11)=(10)/(4)	
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konfli di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
7	1	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	100%	13 desa	13 desa	100,00	
7	1	04	7.04	01	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	100%	12 laporan	12 laporan	57,14	
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	100%	100%	100%	100,00	
7	1	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%	100%	28 dokumen	28 dokumen	57,14	
7	1	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dok. fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%	100%	13 dokumen	12 dokumen	57,14	
7	1	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Dok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%	100%	13 dokumen	12 dokumen	50,00	
7	1	06	2.01	9	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%	100%	13 dokumen	12 dokumen	50,00	
7	1	06	2.01	12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%	100%	13 dokumen	12 dokumen	50,00	

Dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ujungpangkah sampai dengan Tahun 2024 lampiran Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017), maka dapat dilihat hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 2.949.981,00,- dengan output 2 (dua) dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun melalui hasil kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan Ujungpangkah / Forum SKPD.
Realisasi : Fisik 100 % dan keuangan 100 %

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
Alokasi Dana untuk sub kegiatan ini Rp.3.609.512,00 dengan output 1(satu) dokumen RKA-SKPD dan KoordinRealisasi fisik : 100% dan Keuangan 100%

1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Alokasi Dana untuk sub kegiatan ini Rp 3.433.377,00 dengan output 1 (satu) dokumen
Realisasi fisik : 100% dan Keuangan 100%

1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 3.850.716,00- dengan output 12 Laporan
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp.2.686.550.689,00 dengan

output 16 Orang ASN Kecamatan Ujungpangkah dibayarkan gaji dan tunjangannya selama 12 bulan dalam tahun anggaran berjalan.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 93.90%

1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 3.839.398,00 dengan output 1 Laporan

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Alokasi Dana untuk Sub ini Rp 69.485.078,00 output 1 Paket. Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 100%

1.3.2. Sub Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Alokasi Dana untuk Sub ini Rp 25.782.750,00 output 1 Paket. Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 100%

1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 7.243.075,00 dengan output 12 bulan. Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 2.079.000,00 dengan output 1 Jenis. Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 17.920.000,00 dengan output 1 Jenis. Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 99.89 %

1.3.6. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 16.738.650,00 dengan output 2 Jenis Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 99.97 %

1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 26.577.000,00 dengan output 12 Bulan Realisasi. Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 98.41 %

1.4.2. Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 8.865.000,00 dengan output 12 Bulan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.4.3. Sub Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 186.534.000,00 dengan output 9 Tenaga THL Kecamatan Ujungpangkah dibayarkan gaji selama 12 bulan dalam tahun anggaran berjalan. Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 99.94 %

1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 33.600.000,00 dengan output 12 Bulan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan. Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 7.142.326,00 dengan output 12 Bulan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 7.284.500,00 dengan output 12 Bulan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 99.99%

1.5.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 17.250.000,00 dengan

output 12 Bulan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan

2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 6.799.000,00. Output 13 Desa Realisasi: Fisik 100% dan keuangan 99.99%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 34.559.056,00 output 2 Kegiatan yakni:

1. Kegiatan Pra Musrenbang Peserta 50 Orang
2. Musrenbang Peserta 100 Orang dan

3.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 36.749.542,00. Output 13 Desa Realisasi: Fisik 100% dan keuangan 100%

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 52.500.001,00. Output 13 Desa Realisasi: Fisik 100% dan keuangan 100%

4. Kegiatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal

di Wilayah Kecamatan, Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 79.900.2002 output 12 laporan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 6.500.064,00 output 26 dokumen
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

5.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 11.499.657,00 output 13 Desa. Realisasi fisik 100% dan Keuangan 100%

5.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 4.500.322,00 output 13 Laporan Realisasi fisik 100% dan Keuangan 100%

5.1.4. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa. Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp 13.314.756,00 output 13 Laporan Realisasi fisik 100% dan Keuangan 100%

5.1.5. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan. Alokasi dana sub kegiatan ini Rp. 115.499.840,00 dengan output 12 Bulan Realisasi fisik 100% dan Keuangan 99.97%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD adalah proses evaluasi yang sistematis dan objektif untuk menilai sejauh mana Perangkat Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa aspek yang dapat dianalisis dalam kinerja pelayanan Kecamatan Ujungpangkah sebagai berikut:

- a. Kualitas Pelayanan : Bertujuan untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Ujungpangkah termasuk kecepatan, ketepatan dan keramahan
- b. Aksesibilitas : Bertujuan untuk menilai sejauh mana Kecamatan Ujungpangkah dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien termasuk kemudahan akses dan ketersediaan informasi
- c. Efisiensi : Bertujuan untuk menilai sejauh mana Kecamatan Ujungpangkah dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien termasuk penggunaan sumber daya dan waktu
- d. Efektivitas : menilai sejauh mana PD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Akuntabilitas ; Bertujuan untuk menilai sejauh mana kecamatan Ujungpangkah dapat dipertanggungjawabkan atas kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dimana Kecamatan Ujungpangkah dalam melakukan analisis kinerja pelayanan dengan menggunakan metode Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Ujungpangkah.

Tabel 2.2 (T.C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ujungpangkah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ujungpangkah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		84%	89%	90%	91%	88.11%	89.73	91%	91,5%	92%	Data realisasi Capaian untuk Tahun 2026 akan Capaian untuk menyesuaikan Dengan Renstra baru

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

1. Belum optimalnya sistem kualitas Pelayanan Publik ,kurangnya Kompetensi petugas pelayanan publik serta keterbatasan infrastruktur teknologi dalam pelayanan publik
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang memadai
3. Adanya Refocusing Anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan terhambat

Untuk mengatasi isu-isu tersebut upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Ujungpangkah antara lain :

1. Meningkatkan Kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada petugas pelayan publik
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan membuat prosedur pelayanan yang jelas,transparan dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada SOP.
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayan publik
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan publik serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelayan publik.

Sedangkan Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Berdasarkan isu – isu penting sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam perumusan

program dan kegiatan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program yang harus dilaksanakan adalah program yang berkontribusi dalam capaian target kinerja pelayanan Kecamatan Ujungpangkah serta capaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025- 2029.
2. Memperhatikan penganggaran program dan kegiatan sesuai kebutuhan anggaran setiap sub kegiatan sehingga target indikator program dan kegiatan dapat tercapai dengan tetap memperhitungkan pengaruh faktor penghambat dan peluang capaian target.
3. Output program, kegiatan dan sub kegiatan harus bersifat terukur sehingga memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ujungpangkah
4. Output dan outcome program, kegiatan dan sub kegiatan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta stakeholder baik secara materiil maupun immateriil.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Ujungpangkah telah ditetapkan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD

1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD

1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3.3 Penyediaan Barang Cetak Penggandaan

3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.3 Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

1.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1.2 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

1.3 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

1.4 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Ujungpangkah dapat dilihat pada Tabel 2.3 (Tabel. T-C.31) berikut ini :

Tabel 2.3 T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Ujung pangkah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	3.365.321.620,94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Ujung pangkah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	3.365.321.620,94	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ujung pangkah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran	4 dokumen	9.921.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kec. Ujung pangkah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran	100%	9.921.700,00	

			n, dan Evaluasi Kinerja			Perangkat Daerah		ran, dan Evaluasi Kinerja			
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ujung pangk ah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	2.964.352.5 20,94	Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ujung pangk ah	Persentase fasilitasi Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.964.352.520 ,94	
3.	Administra si Umum Perangkat Daerah	Kec. Ujun gpan gkah	Persentase fasilitasi Administra si Umum Perangkat Daerah	12 bulan	112.141.600 ,00	Administ rasi Umum Perangka tDaerah	Kec. Uju ngp ang kah	Persentas e fasilitasi Administra si Umum Perangkat Daerah	100%	112.141.600,0 0	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kec. Ujun gpan gkah	Persentase fasilitasi penyediaa n jasa penunjang operasiona l kantor	12 bulan	248.504.900 ,00	Penyedia an Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Kec. Uju ngp ang kah	Persentas e fasilitasi penyediaa n jasa penunjang operasion al kantor	100%	248.504.900,0 0	
5.	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kec. Ujun gpan gkah	Persentase fasilitasi pemelihara an Barang Milik Daerah	12 bulan	30.400.900 ,00	Pemeliha ran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Kec. Uju ngp ang kah	Persentas e fasilitasi pemeliha ran Barang Milik Daerah	100%	30.400.900,0 0	
II	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ujung pangk ah	Persentasi fasilitasi kegiatan pemberdaya an desa	100%	80.007.800 ,00	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ujung pangk ah	Persentasi fasilitasi kegiatan pemberday aan desa	100%	80.007.800,0 0	
6.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ujung pangk ah	Persentasi fasilitasi kegiatan pemberdayaa n desa	13 desa	44.504.800 ,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	Kec. Ujung pangk ah	Persentasi fasilitasi kegiatan pemberday aan desa	100%	44.504.800, 00	
7.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Ujung pangk ah	Persentase fasilitasi Lembaga kemasyaraka tan tingkat kecamatan	13 desa	35.503.000 ,00	Pemberdaya an Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan	Kec. Ujung pangk ah	Persentase fasilitasi Lembaga kemasyara katan tingkat kecamatan	100%	35.503.000, 00	
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Ujung pangk ah	Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	40.040.200 ,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Ujung pangk ah	Persentase fasilitasi koordinasi ketentrama n dan ketertiban umum	100%	40.040.200, 00	

8.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Ujungpangkah	Presentasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	40.040.200,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Ujungpangkah	Presentasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	40.040.200,00	
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Ujungpangkah	Persentasi fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	104.751.500,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Ujungpangkah	Persentasi fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	104.751.500,00	
9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ujungpangkah	Presentasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13 desa	104.751.500,00	Presentasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ujungpangkah	Presentasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	104.751.500,00	
JUMLAH					3.590.121.120,94					3.590.121.120,94	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat telah ditetapkan melalui musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026 .

Ketetapan tersebut sebagai rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Ujungpangkah dan bersifat pengkoordinasian sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, karena pelaksanaanya sudah ditangani oleh SKPD yang membidangi, sebagaimana yang terinci dalam *lampiran* Tabel 2.4 (Tabel. T-C.32) berikut ini : **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026**

Tabel 2.4 (Tabel T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	besaran/volume	Catatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Ujungpangkah	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ujungpangkah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	4 dokumen	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ujungpangkah	Jumlah dokumen Renja OPD	1 dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec. Ujungpangkah	Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kec. Ujungpangkah	Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	
6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ujungpangkah	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	1 Laporan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ujungpangkah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ujungpangkah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	18 orang	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ujungpangkah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 laporan	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ujungpangkah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ujungpangkah	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	
13	Penyediaan Bahan Logistik	Kec. Ujungpangkah	Jumlah penyediaan bahan logistik	1 paket	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ujungpangkah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ujungpangkah	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 laporan	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kec. Ujungpangkah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	1 Dokumen	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	12 laporan	
18	Penyedia Jasa dan Peralatan Umum Kantor	Kec. Ujungpangkah	Jumlah Fasilitasi Pembayaran Jasa dan Peralatan umum Kantor	12 laporan	

19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 laporan	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 unit	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas Operasional /Lap.	1 unit	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	1 unit	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	13 desa	
23	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Kec. Ujungpangkah	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan desa	13 desa	
24	peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Ujungpangkah	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang efektif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13 desa	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	13 Desa	
25	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Ujungpangkah	Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dibina	13 Desa	
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Ujungpangkah	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	
1	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Ujungpangkah	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	13 Desa	
26	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Kec. Ujungpangkah	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	13 Desa	
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Ujungpangkah	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ujungpangkah	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan	

27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	13 dokumen	
28	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Ujungpangkah	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 dokumen	
29	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ujungpangkah	Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan monev pembangunan didesa	13 dokumen	
30	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Ujungpangkah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 dokumen	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026, telaahan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi landasan utama agar pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan selaras dengan prioritas pembangunan yang lebih tinggi.

Secara nasional, arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 mengacu pada tema pembangunan **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**. Pemerintah pusat menekankan pada peningkatan produktivitas ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur dasar, serta penguatan pelayanan publik berbasis digital.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 mengusung tema **“Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Sejahtera”**, yang fokus pada peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penurunan ketimpangan wilayah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui RKPD Tahun 2026 menetapkan tema pembangunan **“Penguatan Ekonomi Lokal, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Pemerataan Pembangunan Wilayah”**. Dalam konteks ini, Kecamatan Ujungpangkah berperan penting sebagai simpul pembangunan di kawasan pesisir utara Kabupaten Gresik yang memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, serta pariwisata berbasis alam dan budaya.

Berdasarkan telaahan terhadap arah kebijakan tersebut, Kecamatan Ujungpangkah menetapkan prioritas pembangunan tahun 2026 yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta peningkatan infrastruktur dasar yang menunjang pertumbuhan ekonomi lokal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada arah kebijakan daerah, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan Renja

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini adalah sebagai wujud sinkronisasi dan penjabaran Rencana pembangunan Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Kecamatan. Tujuan Renja yang mengacu pada tujuan Renstra adalah : “ ***Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik*** “,

3.1.2 Sasaran Renja

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus terhadap penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Yaitu : “ ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan*** “

3.3. Program Dan Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut :

3.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Latar Belakang

Latar Belakang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah belum optimalnya aparat birokrat, ketidaksesuaian keahlian/bidang sebagai petugas pelayanan

publik yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap aturan kedisiplinan serta profesionalisme yang rendah sehingga belum dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat dalam mewujudkan *Good Governance*.

B. Tujuan Program

Tujuan program meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan dalam melaksanakan TUPOKSI sebagai Aparatur Pemerintahan

C. Sasaran Program

Sasaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- Pemenuhan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Umum
- Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air,dan listrik
- Tercapainya perawatan barang milik daerah
- Tercapainya tertib administrasi keuangan
- Terciptanya lingkungan kantor kecamatan yang bersih dan nyaman
- Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN
- Pemenuhan alat tulis kantor
- Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
- Pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan kantor
- Pemenuhan makanan dan minuman
- Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang didanai dengan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang ada

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

- Persentase personil /luas ruangan yang mendapatkan fasilitas
- Persentase pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pemberi jasa Jaminan barang milik daerah
- Persentase pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pemberi jasa Administrasi Keuangan
- Persentase luas bangunan yang terawat terhadap luas halaman yang ada
- Persentase Pegawai yang tercukupi kebutuhan ATK terhadap seluruh pegawai
- Persentase jumlah kegiatan yang tercukupi kebutuhan akan barang terhadap jumlah kegiatan yang memerlukan barang cetakan dan penggandaan
- Persentase rata – rata yang belum menggunakan instalasi jaringan Internet terhadap seluruh bangunan kantor
- Persentase penyelesaian masalah antara aparatur dan masyarakat terhadap masalah yang timbul
- Persentase jumlah rapat/kegiatan yang berhasil dilaksanakan
- Persentase Pengadaan peralatan Gedung kantor
- Persentase Pengadaan ATK dan mebeler

- Persentase Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Persentase Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- Persentase Pemeliharaan rutin/berkala Mesin dan peralatan gedung/kantor lainnya
- Persentase Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kantor.

Dalam rangka mengimplementasikan **Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut:

3.1.2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Latar Belakang

Latar belakang program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian diri masyarakat secara mandiri serta menciptakan kondisi dan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang.

B. Tujuan Program

Tujuan program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat Desa dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat serta masyarakat ikut serta dan berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan.

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah meningkatkan kemampuan Lembaga Masyarakat Desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, serta meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah :

- Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa
- Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

3.1.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Latar Belakang

Latar belakang program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai dasar untuk mewujudkan masyarakat yang aman , tertib dan tentram serta perlindungan hak dan kewajiban semua masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Ujungpangkah

B. Tujuan Program

Tujuan program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan adalah terwujudnya lingkungan unit kerja dan lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah terciptanya situasi keamanan lingkungan yang kondusif.

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah :

- Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah :

- Presentasi Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.1.4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. Latar Belakang

Latar Belakang program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan desa sebagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

B. Tujuan Program

Tujuan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan

Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa /RT/RW.”

C. Sasaran Program

Sasaran program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah terciptanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai dengan aturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Presentasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
- Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Presentasi Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 3.1 (T-C.33) Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No.	KODE REKENING	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4		7	8
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN Ujungpangkah			3.590.121.120,94		3.949.133.233,03
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	3.365.321.620,94	100%	3.701.853.783,03
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	4 dokumen	9.921.700,00	6 dokumen	10.913.870,00
1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja OPD	1 dokumen	3.528.800,00	1 dokumen	3.881.680,00
2	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	1.689.100,00	1 dokumen	1.858.010,00
3	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	2.964.600,00	1 dokumen	3.261.060,00
4	7.01.01.2.01.0006	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	1 Laporan	1.739.200,00	1 Laporan	1.913.120,00
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	2.964.352.520,94	12 bulan	3.260.787.773,03
5	7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	25 orang	2.962.304.120,94	25 orang	3.258.534.533,03
6	7.01.01.2.02.002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 laporan	2.048.400,00	5 laporan	2.253.240,00
3	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	112.141.600,00	12 bulan	123.355.760,00

7	7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	41.212.100,00	1 paket	45.333.310,00
8	7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	1 paket	11.950.600,00	1 paket	13.145.660,00
9	7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	6.920.400,00	1 paket	7.612.440,00
10	7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 laporan	10.000.000,00	1 laporan	11.000.000,00
11	7.01.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik SKPD	1 Dokumen	42.058.500,00	1 Dokumen	46.264.350,00
4	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	248.504.900,00	12 bulan	273.355.390,00
12	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	12 laporan	42.358.900,00	12 laporan	46.594.790,00
13	7.01.01.2.08.0003	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Fasilitas Pembayaran Jasa dan Peralatan umum Kantor	12 laporan	6.700.000,00	12 laporan	7.370.000,00
14	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 laporan	199.446.000,00	12 laporan	219.390.600,00
5	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	30.400.900,00	12 bulan	33.440.990,00
15	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 unit	13.337.300,00	12 unit	14.671.030,00
16	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas Operasional /Lap.	1 unit	6.170.000,00	1 unit	6.787.000,00
17	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung	1 unit	10.893.600,00	1 unit	11.982.960,00

		Lainnya	kantor				
III	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	80.007.800,00	100%	88.008.580,00
7	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	13 desa	44.504.800,00	13 desa	48.955.280,00
18	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang desa	13 desa	30.000.000,00	13 desa	33.000.000,00
19	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang efektif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13 desa	14.504.800,00	13 desa	15.955.280,00
8	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	13 desa	35.503.000,00	13 desa	39.053.300,00
20	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dibina	13 desa	35.503.000,00	13 desa	39.053.300,00
IV	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	40.040.200,00	100%	44.044.220,00
10	7.01.04.2.02	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	13 desa	40.040.200,00	13 desa	44.044.220,00
21	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	13 desa	40.040.200,00	13 desa	44.044.220,00
V	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100%	104.751.500,00	100%	115.226.650,00

11	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13 desa	104.751.500,00	13 desa	115.226.650,00
22	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	13 dokumen	4.620.800,00	13 dokumen	5.082.880,00
23	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 dokumen	4.629.000,00	13 dokumen	5.091.900,00
24	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan monev pembangunan didesa	13 dokumen	7.500.200,00	13 dokumen	8.250.220,00
25	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 dokumen	88.001.500,00	13 dokumen	96.801.650,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Rencana kerja Kecamatan Ujungpangkah pada tahun anggaran 2026 disusun berdasarkan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra PD). Rencana kerja ini untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta meningkatkan kinerja Kecamatan Ujungpangkah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Ujungpangkah menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang berfokus pada **peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.**

Seluruh kegiatan tahun berjalan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik, serta sejalan dengan tujuan pembangunan wilayah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 menjadi kelanjutan dari hasil pelaksanaan tahun sebelumnya, dengan penekanan pada peningkatan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi pelayanan masyarakat berbasis teknologi dan partisipasi publik.

**Tabel 4.1 Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(RENJA OPD) Kecamatan Ujungpangkah Kab. Gresik**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASION AL	DAERAH				
2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KECAMATAN Ujungpangkah						3.590.121.120 ,94							3.949.133.233	
7	UNSUR KEWILAYAHAN													-	
7.01	KECAMATAN													-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	%tase Ketercapaian sasaran OPD	100 %			100%	3.365.321.620 ,94	Kab. Gresik, Ujungp angkah , Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM				100%	3.701.853.783	
7.01.01.2. 01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 doku men		3 doku men	4 dokum en	9.921.700,00	Kab. Gresik, Ujungp angkah , Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P1 - Penge ntasan kemiskinan menuju keadilan dan keseja htraan sosial Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangunan	-	4 dokumen	10.913.870	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah														

						1 Dokumen	3.528.800,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P1 - Penguatan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	1 Dokumen	3.881.680	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.689.100,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Dokumen	1.858.010,00	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.964.600,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P1 - Penguatan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan	-	1 Dokumen	3.261.060	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.739.200,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P1 - Penguatan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan	-	1 Laporan	1.913.120	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.964.352.520,94	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 bulan	3.260.787.773	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan		13 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.962.304.120,94	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	18 Orang/bulan	3.258.534.533	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.048.400,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Laporan	2.253.240	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	112.141.600,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	12 bulan	123.355.760	KECAMATAN Ujungpangkah

		Perangkat Daerah						, Semua Kel/Des a	ALOKASI UMUM						
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		1 Paket	1 Paket	41.212.100,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	45.333.310	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		1 Paket	1 Paket	11.950.600,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	13.145.660	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.920.400,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	7.612.440	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Laporan	11.000.000	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42.058.500,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Dokumen	46.264.350	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	248.504.900,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 bulan	273.355.390	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	42.358.900,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Laporan	46.594.790	KECAMATAN Ujungpangkah
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Fasilitasi Pembayaran Jasa dan Peralatan umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.700.000,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Laporan	7.370.000	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	199.446.000,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Laporan	219.390.600	KECAMATAN Ujungpangkah

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	30.400.900,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 bulan	33.440.990	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	13.337.300,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Unit	14.671.030	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	6.170.000,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	6.787.000	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.893.600,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	11.982.960	KECAMATAN Ujungpangkah

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13 Desa	30.000.000,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa seKecamatan Ujungpangkah	13 Desa	33.000.000	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang efektif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				13 Desa	14.504.800,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa seKecamatan Ujungpangkah	13 Desa	15.955.280	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditingkat Kecamatan	12 Bulan		12 Bulan	13 Desa	35.503.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa seKecamatan Ujungpangkah	13 Desa	39.053.300	KECAMATAN Ujungpangkah

7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
		Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dibangun				13 Desa	35.503.000,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pemanfaatan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa seKecamatan Ujungpangkah	13 Desa	39.053.300	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%tase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100 %			100%	40.040.200,00						100%	44.044.220	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		13 Desa		13 Desa	13 Desa	40.040.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pemanfaatan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa seKecamatan Ujungpangkah	13 Desa	44.044.220	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

[illegible]

[illegible]

		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.200,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa seKecamatan Ujungpangkah	1 Dokumen	8.250.220	KECAMATAN Ujungpangkah
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
		Jumlah Fasilitas Pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewajiban Lembaga Masyarakat an				13 Dokumen	88.001.500,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa seKecamatan Ujungpangkah	13 Dokumen	96.801.650	KECAMATAN Ujungpangkah
J U M L A H							3.590.121.120,94						3.949.133.233		

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025- 2029 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026.
2. Dengan ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.
3. Rencana Kerja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Rencana Kerja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2026
6. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam

perencanaan kinerja tahun 2026 dan dapat dihindari adanya RKA-SKPD yang keluar dari kesepakatan dalam Renja.

Ujungpangkah, 20 Oktober 2025
CAMAT UJUNGPANGKAH

SHOFWAN HADI, S.Ag., M.MB

Pembina

NIP. 19750926 200901 1 001